

Mengembalikan Peran Kapital Budaya dalam Pendidikan Kritis Berdasarkan Pemikiran Pierre Bourdieu

Adelstein Kadola ^a

Norbertus Alexandro Tutu Sare ^{b,1}

Rodrigues Oktavian Payung ^c

Emanuel Bella Gobang ^d

^{a,b,c} Fakultas Teologi, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, Indonesia

^d Sekolah Tinggi Filsafat Driyakara

¹ norbertussare@gmail.com

Kata Kunci:

Kapital Budaya, Ketimpangan Sosial, Pendidikan, Manusia Kritis.

Abstrak

Pendidikan sering menjadi jalan memobilisasi masyarakat yang memproduksi ketimpangan sosial akibat terpinggirkannya kapital budaya. Akibatnya, pendidikan gagal mewujudkan tugas untuk mengembangkan manusia yang kritis, bermoral, dan beradab. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mengeksplorasi konsep kapital budaya Pierre Bourdieu dan menganalisis bagaimana dominasi kapital ekonomi dan sosial dalam sistem pendidikan berkontribusi terhadap marginalisasi kapital budaya. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan menelaah pemikiran Bourdieu. Hasil penelitian ini menunjukkan perlunya reposisi kapital budaya untuk mengembalikan fungsi pendidikan sebagai ruang pemberdayaan intelektual dan moral. Dominasi kapital ekonomi dan sosial menjadikan pendidikan cenderung berorientasi pada tujuan pragmatis yang memperkuat reproduksi struktur sosial yang tidak adil. Reposisi kapital budaya menjadi dasar pengembangan kebijakan pendidikan yang menguatkan aksesibilitas pengetahuan, penguatan literasi kritis, apresiasi seni dan budaya, serta pengembangan keterampilan intelektual yang merata. Pengembangan kapital budaya menjadikan pendidikan dapat kembali menjalankan fungsinya sebagai sarana pembentukan manusia yang kritis, bermoral, dan beradab.

Restoring the Role of Cultural Capital in Critical Education Based on the Thought of Pierre Bourdieu

Keywords:

Critical Human Being, Cultural Capital, Education Social Inequality.

Abstract

Education often serves as a pathway that mobilizes society but simultaneously reproduces social inequality due to the marginalization of cultural capital. As a result, education fails to fulfill its mission of developing critical, moral, and civilized human beings. This qualitative study aims to explore Pierre Bourdieu's concept of cultural capital and analyze how the dominance of economic and social capital within the education system contributes to the marginalization of cultural capital. The method used is a literature study examining Bourdieu's theoretical framework. The findings indicate the necessity of repositioning cultural capital to restore the function of education as a space for intellectual and moral empowerment. The dominance of economic and social capital has led education to become pragmatically oriented, reinforcing the reproduction of unjust social structures. Repositioning cultural capital provides a foundation for developing educational policies that strengthen knowledge accessibility, critical literacy, appreciation of arts and culture, and equitable intellectual skills development. Strengthening cultural capital allows education to once again fulfill its essential role as a means of shaping critical, moral, and civilized human beings.

Pendahuluan

Pendidikan sering disebut sebagai jalan menuju kemajuan, sarana pembebasan, dan wadah pembentukan manusia seutuhnya. Di dalamnya, manusia diharapkan bertumbuh menjadi pribadi yang kritis dalam berpikir, bermoral dalam bertindak, dan beradab dalam berelasi. Pendidikan bukan hanya tentang mentransfer pengetahuan, melainkan juga tentang membentuk kesadaran, kesadaran akan diri, sesama, dan realitas sosial yang mengitarinya. Dalam pengertian ideal ini, pendidikan seharusnya menjadi kekuatan yang memanusiaikan manusia.

Namun, jika kita menatap realitas yang ada, cita-cita luhur tersebut sering kali tampak jauh dari kenyataan. Dunia pendidikan di berbagai tingkat justru kerap mencerminkan ketimpangan sosial yang sudah mengakar dalam

masyarakat. Sekolah dan universitas yang seharusnya menjadi ruang mobilitas sosial malah berubah menjadi cermin dari struktur kelas sosial. Anak-anak dari keluarga kaya memiliki akses terhadap sekolah unggulan, fasilitas belajar modern, dan guru berkualitas tinggi.¹ Sementara itu, mereka yang berasal dari keluarga ekonomi lemah harus berjuang keras di tengah keterbatasan sumber daya, bahkan untuk memperoleh pendidikan dasar yang layak. Akibatnya, pendidikan yang diharapkan menjadi alat keadilan justru memperkokoh ketidakadilan.

Ketimpangan ini tidak muncul begitu saja. Hal ini merupakan hasil dari dominasi berbagai bentuk kapital yang bekerja dalam sistem sosial. Pierre Bourdieu, seorang sosiolog Prancis, memberikan kerangka teoritis yang tajam untuk memahami fenomena ini. Menurutnya, masyarakat tidak hanya dibentuk oleh kapital ekonomi seperti uang atau kekayaan material, tetapi juga oleh kapital sosial, kultural (atau budaya), dan simbolik.²

Dalam konteks pendidikan, kapital ekonomi dan sosial sering kali mendominasi, sementara kapital budaya yang seharusnya menjadi inti dari proses pendidikan sering tersingkir.³

Dominasi kapital ekonomi misalnya tampak jelas dalam proses seleksi dan akses terhadap pendidikan. Sekolah-sekolah “unggulan” membutuhkan biaya tinggi, dan kualitas pembelajaran sering kali berbanding lurus dengan kemampuan ekonomi orang tua. Sementara itu, kapital sosial seperti jaringan relasi, koneksi keluarga, dan status sosial memberikan keuntungan tersendiri bagi mereka yang lahir di lingkungan yang sudah mapan. Kedua jenis kapital ini berkolaborasi mempertahankan posisi sosial kelompok tertentu, sehingga pendidikan tidak lagi menjadi ruang yang netral, melainkan medan pertarungan simbolik yang mencerminkan dan mereproduksi struktur sosial.⁴

Dalam perspektif Bourdieu, hal ini juga terkait erat dengan konsep *habitus* yakni sistem disposisi, kebiasaan, dan cara berpikir yang terbentuk melalui pengalaman hidup seseorang. *Habitus* seseorang dari kelas atas berbeda dengan *habitus* dari kelas bawah hal ini berpengaruh pada cara mereka menilai, memahami, dan merespons dunia pendidikan. Misalnya, anak dari keluarga terdidik biasanya sudah terbiasa dengan budaya membaca, berpikir kritis, dan berdebat; hal-hal yang dianggap “alami” oleh sekolah. Sebaliknya, anak dari

¹ Aji Permadi, *Kualitas Pendidikan Kita Bersahabat Karib dengan Kebobrokan* (Jakarta, 2024).

² Mega Mustikasari, Arlin Arlin, and Syamsu A Kamaruddin, “Pemikiran Pierre Bourdieu dalam Memahami Realitas Sosial,” *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora* 6, no. 1 (January 2023): 12, <https://doi.org/10.31539/kaganga.v6i1.5089>.

³ M Miftahusyain, *KAPITAL SOSIAL DAN PEMBANGUNAN DI INDONESIA*, n.d., 5.

⁴ KRT Samsul Hadi Dwijonagoro, *PERMASALAHAN PENDIDIKAN DAN SOLUSINYA DI INDONESIA*, n.d., 7.

keluarga pekerja mungkin tidak memiliki kebiasaan tersebut, sehingga sejak awal sudah berada dalam posisi yang kurang diuntungkan.

Dengan demikian, pendidikan tidak bisa dipahami semata-mata sebagai proses netral atau objektif. Pendidikan adalah medan (*field*) - menggunakan istilah Bourdieu - di mana berbagai bentuk kapital saling berinteraksi dan berkompetisi. Dalam medan ini, mereka yang memiliki kapital lebih besar cenderung menguasai arah permainan, sementara yang lain harus berjuang keras untuk sekadar bertahan.

Oleh karena itu, memahami pendidikan melalui lensa Bourdieu menjadi sangat relevan untuk menyingkap struktur kekuasaan yang tersembunyi di baliknya. Pendidikan bukan hanya soal belajar dan mengajar, tetapi juga tentang siapa yang memiliki hak untuk menentukan nilai, norma, dan "kebenaran" di dalamnya. Melalui analisis kapital, habitus, dan medan, kita dapat melihat bahwa ketimpangan dalam pendidikan bukan sekadar masalah kebijakan, melainkan bagian dari sistem sosial yang lebih dalam dan kompleks. Pemahaman ini menjadi langkah awal untuk membayangkan kembali pendidikan sebagai sarana emansipasi bukan reproduksi ketimpangan.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur. Metode studi literatur adalah metode penelitian dengan cara mengumpulkan, menganalisis, dan menyintesis literatur atau sumber informasi yang relevan dan telah dipublikasikan sebelumnya.⁵ Metode ini melibatkan penelusuran beragam sumber literatur, seperti buku, artikel, laporan dan lain-lainnya untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang topik yang sedang diteliti. Prosesnya dimulai dengan perumusan topik dan identifikasi permasalahan yang menjadi fokus kajian, dilanjutkan dengan pencarian serta pengumpulan literatur yang relevan untuk mendukung kerangka teoritis dan konteks penelitian. Setelah itu, dilakukan seleksi dan validasi data guna memastikan bahwa sumber-sumber yang digunakan memiliki tingkat relevansi dan keakuratan yang memadai. Tahap berikutnya adalah analisis dan interpretasi data yang telah diperoleh, untuk menggali makna dan keterkaitan informasi secara mendalam. Seluruh rangkaian proses ini kemudian diakhiri dengan penulisan hasil penelitian secara sistematis dan ilmiah sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik atas temuan yang didapatkan.

⁵ Ujang Jamaludin, Reksa Adya Pribadi, and Siti Sarni, *Implementasi Model Problem Based Learning Pada Pembelajaran Ipa Untuk Mengembangkan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa*, 09 (2023).

Rumusan Masalah

- a. Bagaimana konsep kapital budaya menurut Pierre Bourdieu?
- b. Bagaimana dominasi kapital ekonomi dan sosial menyebabkan marginalisasi kapital budaya dalam pendidikan?
- c. Bagaimana reposisi kapital budaya dapat mengembalikan fungsi pendidikan sebagai ruang pemberdayaan kritis dan moral?

Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maksud dan tujuan penelitian mengenai “Mengembalikan Peran Kapital Budaya dalam Pendidikan Kritis Berdasarkan Pemikiran Pierre Bourdieu” sebagai berikut:

- a. Mengeksplorasi konsep kapital budaya menurut pemikiran Pierre Bourdieu, guna memahami bagaimana kapital budaya berperan dalam pendidikan kritis.
- b. Menganalisis bentuk dominasi kapital ekonomi dan sosial yang menyebabkan marginalisasi kapital budaya dalam praktik pendidikan saat ini.
- c. Menawarkan reposisi atau penempatan ulang kapital budaya sebagai dasar bagi pengembangan pendidikan yang bersifat kritis, humanistik, dan mampu memberdayakan peserta didik secara intelektual dan moral.

Tujuan ini diarahkan untuk mengembalikan peran kapital budaya sebagai fondasi penting dalam menciptakan pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada mobilitas ekonomi dan status sosial, melainkan juga menumbuhkan nilai-nilai kritis, moral, dan humanis dalam masyarakat melalui pendidikan.

Biografi

Pierre Bourdieu lahir pada 1 Agustus 1930 di daerah pedesaan di barat daya Prancis. Sebagai anak tunggal dari seorang petani penggarap yang kemudian menjadi tukang pos, ia meninggalkan daerahnya atas saran seorang guru SMA untuk mengejar kurikulum akademik elit di Paris. Pengalaman hidup Bourdieu yang berpindah dari lingkungan desa sederhana menuju dunia akademik elit di Paris membentuk kepekaannya terhadap realitas ketimpangan sosial dan pendidikan. Ia menyadari bahwa kesuksesan seseorang tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan atau kerja keras, tetapi juga oleh akses terhadap berbagai bentuk kapital yang diwariskan melalui keluarga dan institusi sosial. Dari sinilah muncul gagasannya tentang *habitus*, *modal*, dan *field* yang menjelaskan bagaimana struktur sosial bekerja secara halus dalam membentuk peluang hidup seseorang. Dalam pandangan Bourdieu, sistem pendidikan menjadi arena utama di mana ketimpangan sosial direproduksi melalui mekanisme simbolik yang tampak netral, tetapi sejatinya menguntungkan kelompok berkapital budaya tinggi. Ia lulus dari École Normale Supérieure yang

prestisius, yang saat itu berada di puncak kehidupan akademik Prancis. Di sana ia mempelajari filsafat. Ia fokus pada epistemologi dan sejarah ilmu pengetahuan, yang membuatnya berseberangan dengan aliran dominan saat itu, eksistensialisme, yang diwakili oleh Jean-Paul Sartre. Vokasi Bourdieu dalam filsafat bergeser secara tiba-tiba ke ilmu sosial setelah ia direkrut ke dalam tentara Prancis dan dikirim ke Aljazair pada puncak Perang Kemerdekaan Aljazair (1956–1962). Di sana ia beralih ke penelitian empiris, melakukan studi etnografis dan statistik tentang transformasi kolonial, serta menyerap strukturalisme Claude Lévi-Strauss.

Setelah kembali ke Prancis, Bourdieu menyelesaikan transformasinya ke sosiologi ia menjadi Direktur Studi di *École des Hautes Études en Sciences Sociales* di Paris (1964); ia mendirikan pusat penelitian (1968), meluncurkan jurnal (*Actes de la recherche en sciences sociales*, 1975), dan membentuk tim penelitian yang fokus pada kekuasaan simbolik dan ketidaksetaraan sosial dalam manifestasinya yang paling luas. Setelah tahun 1970-an, Bourdieu menangani berbagai topik empiris yang semakin beragam (meliputi seni, ritual, kekerabatan, agama, sains, intelektual, bahasa, kelas sosial, dan institusi politik, di antara lainnya) sambil mengembangkan paradigma sendiri, mencari jalan keluar dari oposisi antara objektivisme strukturalis dan subjektivisme konstruktivis pertama kali diusulkan dalam *Outline of a Theory of Practice*. Ia kemudian menyempurnakan konseptualnya tentang habitus, modal, dan lapangan dalam *Distinction* (1984) sebelum terpilih menjadi anggota *Collège de France* pada 1982, di mana risetnya meluas mencakup negara, dominasi gender, dasar-dasar sosial ekonomi, dan pengalaman penderitaan sosial dalam masyarakat kontemporer. Bourdieu membahas isu-isu sosial yang mendesak, seperti dalam *The Weight of the World* (1999), dan mendalami pemikirannya tentang logika praktik yang khas serta dilema epistemologis dalam penyelidikan sosial dalam *Pascalian Meditations* (2000). Ia menjadi tokoh publik terkemuka dalam mobilisasi global melawan neoliberalisme, sementara karyanya memperoleh pengaruh internasional di bidang ilmu sosial dan humaniora. Pada saat kematiannya yang mendadak pada tahun 2002, ia sedang bekerja pada sebuah “teori umum tentang bidang-bidang.”

Dalam konteks pendidikan, pemikiran Bourdieu memberikan kerangka kritis untuk memahami mengapa lembaga pendidikan tidak selalu berfungsi sebagai alat mobilitas sosial. Ia menunjukkan bahwa sekolah sering kali mengonversi kapital budaya menjadi legitimasi akademik, sehingga anak-anak dari keluarga berpendidikan memiliki peluang lebih besar untuk berhasil. Dengan demikian, pendidikan bukan sekadar ruang transfer pengetahuan, tetapi juga arena reproduksi struktur sosial. Pemikiran ini menjadi penting

untuk menganalisis bagaimana dominasi kapital ekonomi dan sosial dapat menyingkirkan peran kapital budaya, sekaligus menjadi dasar untuk membayangkan reposisi pendidikan yang lebih adil dan humanistik.

Hasil dan Pembahasan

Dominasi Kapital Ekonomi dan Sosial dalam Pendidikan

Pendidikan Cenderung Menjadi Instrumen Mobilitas Ekonomi Dan Status Sosial.

Pendidikan telah lama dipandang sebagai salah satu pilar utama dalam pembangunan manusia dan kemajuan sosial.⁶ Dalam konteks modern, ia tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai instrumen mobilitas ekonomi dan status sosial.⁷ Melalui pendidikan, seseorang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan legitimasi sosial yang memungkinkan mereka meningkatkan taraf hidup, memperoleh pekerjaan formal, serta naik ke kelas sosial yang lebih tinggi.⁸ Pendidikan memberikan peluang untuk keluar dari lingkaran kemiskinan dan memperluas akses terhadap sumber daya ekonomi yang lebih baik. Namun, peran strategis ini tidak berdiri sendiri; efektivitas pendidikan sebagai alat mobilitas sangat bergantung pada akses yang adil, kualitas penyelenggaraan, dan dukungan sosial yang tersedia.

Dalam dimensi ekonomi, pendidikan berperan langsung dalam membuka peluang kerja yang lebih baik dan pendapatan yang lebih tinggi.⁹ Pendidikan menyediakan keterampilan dan kompetensi yang relevan dengan pasar tenaga kerja, sehingga memungkinkan seseorang berpartisipasi dalam sektor ekonomi yang lebih produktif. Contohnya dapat dilihat di India, di mana penerapan Undang-Undang Hak atas Pendidikan (Right to Education Act) memberi akses lebih luas bagi anak-anak miskin, meningkatkan tingkat literasi, memperluas kesempatan kerja, dan menekan angka kemiskinan.¹⁰ Fenomena ini menunjukkan bahwa pendidikan berfungsi sebagai mesin mobilitas vertikal

⁶ Maya Mutia Nazmi dan Yusnita Lisda Pulungan, "Peran Pendidikan sebagai Alat Transformasi Sosial," *Jurnal Kajian Agama Islam* 8, no. 12 (2024), eISSN 2443-1186, <https://share.google/rychmPPxYo9OzoWC1>.

⁷ Maya Muizatil Lutfillah, Arita Marini, dan Maratun Nafiah, "Pengelolaan Pendidikan Dasar Dikaitkan dengan Mobilitas Sosial," *An-Nidzam: Jurnal Manajemen Pendidikan dan Studi Islam* 9, no. 1 (2022): <https://doi.org/10.33507/an-nidzam.v9i1.465>.

⁸ Amri RudiRahman, "Pendidikan dan Status Sosial," *Kompasiana*, 3 Februari 2022, 22:07, <https://www.kompasiana.com/amrurudi354/61fbefa7b4616e129807bbb3/pendidikan-dan-status-sosial?l=c>.

⁹ Rinaldi Muammar. (2020). Pendidikan sebagai Pilar Kesejahteraan: Menghubungkan Pendidikan dengan Kemajuan Sosial dan Ekonomi. *JURNAL EKODIK*, Vol (8), No.1 : halaman 1-6.

¹⁰ Mahnoor Ali, "The Right to Education Act in India: Success and Challenges in Implementation," *Broken Chalk*, accessed October 19, 2025, <https://brokenchalk.org/the-right-to-education-act-in-india-success-and-challenges-in-implementation/>.

yang mendorong naiknya posisi individu dalam struktur ekonomi dan budaya masyarakat.

Namun, pendidikan tidak hanya berperan dalam aspek ekonomi, tetapi juga memengaruhi status sosial seseorang. Tingkat pendidikan formal sering kali menjadi ukuran prestise dan legitimasi sosial, bahkan menjadi syarat utama dalam proses seleksi kerja atau pengakuan publik. Semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin besar pula penghargaan sosial yang diterimanya. Akan tetapi, kondisi ini menciptakan paradoks: pendidikan formal sering dijadikan ukuran utama nilai manusia, padahal kualitas pengetahuan dan integritas pribadi tidak selalu sebanding dengan jenjang akademik. Akibatnya, mereka yang tidak memiliki akses terhadap pendidikan formal kerap mengalami keterasingan sosial, meskipun memiliki kemampuan atau pengetahuan yang setara.

Kendati demikian, potensi pendidikan dalam menciptakan mobilitas sosial sering kali dibatasi oleh realitas ketimpangan akses dan kualitas.¹¹ Faktor ekonomi, geografis, dan sosial-budaya menjadi penentu utama apakah seseorang dapat menikmati manfaat pendidikan secara penuh. Ketimpangan ini menjadikan pendidikan tidak selalu menjadi sarana pembebasan, melainkan justru alat reproduksi struktur sosial yang timpang. Di negara dengan sistem pendidikan yang inklusif dan berbasis pluralisme, mobilitas sosial dapat berlangsung lebih dinamis karena kesempatan belajar terbuka bagi semua. Sebaliknya, di masyarakat dengan sistem pendidikan yang elitis, pendidikan cenderung melestarikan ketidaksetaraan dan memperkuat jarak antara kelas sosial atas dan bawah.

Oleh karena itu, pendidikan hanya dapat berfungsi secara autentik sebagai instrumen mobilitas ekonomi dan status sosial apabila dijalankan dalam kerangka keadilan sosial.¹² Ia harus melampaui sekadar mekanisme seleksi sosial dan menjadi ruang pembentukan manusia yang bebas, kritis, dan berdaya. Pendidikan yang inklusif, humanis, dan berkualitas tidak hanya memperbaiki taraf hidup individu, tetapi juga menata ulang struktur masyarakat agar lebih egaliter dan berkeadilan. Dengan demikian, pendidikan seharusnya bukan sekadar jalan menuju pengakuan sosial, melainkan sarana menuju kemanusiaan yang lebih utuh dan emansipatif.

¹¹ Santo, "Pengaruh Pendidikan terhadap Mobilitas Sosial," *Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Medan Area*, 16 Agustus 2024, <https://pemerintahan.uma.ac.id/2024/08/pengaruh-pendidikan-terhadap-mobilitas-sosial/>

¹² Miranda, & Fransiska Rambu Aya Mayi. (2025). Pendidikan Sebagai Sarana Mobilitas Sosial Dalam Masyarakat Multikultural. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 7(4), 88–94. <https://doi.org/10.6578/triwikrama.v7i4.11074>

Terjadi Komersialisasi Pendidikan Dan Ketimpangan Akses Antar Kelas Sosial.

Komersialisasi pendidikan telah menciptakan jurang ketimpangan yang semakin dalam antara kelas sosial dalam masyarakat.¹³ Pendidikan yang bermutu kini lebih mudah diakses oleh kelompok ekonomi atas, sementara kelas menengah ke bawah kian kesulitan mendapatkan layanan pendidikan berkualitas. Akibatnya, pendidikan kehilangan peran egalitariannya sebagai alat pemerataan sosial dan justru menjadi mekanisme reproduksi ketimpangan. Sekolah dan universitas yang seharusnya menjadi ruang pembentukan manusia yang kritis dan berkarakter kini berubah menjadi institusi yang dikelola dengan logika pasar, di mana biaya, citra, dan profit menjadi ukuran keberhasilan. Pendidikan pun bertransformasi menjadi komoditas ekonomi yang diperjualbelikan, dan bukan lagi hak dasar setiap warga negara.

Fenomena ini melahirkan segregasi sosial dalam dunia pendidikan. Mereka yang mampu membayar mahal dapat menikmati fasilitas unggul, guru terbaik, serta jejaring sosial eksklusif yang membuka jalan bagi masa depan yang lebih baik. Sementara itu, masyarakat berpenghasilan rendah terpaksa menerima pendidikan dengan kualitas seadanya, yang minim fasilitas, guru kurang berkualitas, dan kesempatan terbatas.¹⁴ Ketimpangan ini tidak hanya membatasi mobilitas sosial, tetapi juga memperkuat stigma sosial bahwa kualitas manusia dapat diukur dari kemampuan finansial. Dalam konteks seperti ini, pendidikan tidak lagi menjadi jalan pembebasan dari kemiskinan, melainkan justru menjadi benteng yang memperkuat struktur sosial yang timpang dan sulit ditembus.

Nilai-Nilai Kritis Dan Moral Menjadi Terpinggirkan.

Lebih jauh, komersialisasi pendidikan juga berdampak pada pergeseran orientasi nilai.¹⁵ Ketika lembaga pendidikan beroperasi dengan paradigma bisnis, maka tujuan pendidikan beralih dari pembentukan manusia berpengetahuan dan bermoral menjadi sekadar pencapaian nilai dan keuntungan ekonomi. Mentalitas pendidik perlahan digantikan oleh mentalitas pedagang; siswa dipandang sebagai konsumen, dan ilmu dijadikan produk yang dijual dalam paket-paket kurikulum. Ruang refleksi kritis dan diskursus

¹³ Moh Ali Muhsin, "Komersialisasi Pendidikan Perlebar Kesenjangan Sosial," *Mambaul Ulum Bata-Bata*, 26 Agustus 2022, <https://bata-bata.net/2022/08/26/Komersialisasi-Pendidikan-Perlebar-Kesenjangan-Sosial.html>.

¹⁴ Surya Darma dan Annisa Fithria, "Harga Mahal Komersialisasi Pendidikan," *Majalah Suara 'Aisyiyah*, 7 Juni 2024, <https://suaraaisyiyah.id/harga-mahal-komersialisasi-pendidikan/>.

¹⁵ Aulia Juliananda, "Dampak Komersialisasi Pendidikan terhadap Pembangunan Karakter Bangsa: Apa Solusinya?," *Kompasiana*, 12 Juni 2024, <https://www.kompasiana.com/juliaulia/6669c67534777c2d1701ce42/dampak-komersialisasi-pendidikan-terhadap-pembangunan-karakter-bangsa-apa-solusinya?!=c>.

etis semakin terpinggirkan karena dianggap tidak produktif secara ekonomi. Dalam situasi seperti ini, pendidikan kehilangan dimensi moralnya dan hanya berfungsi untuk melahirkan tenaga kerja yang patuh pada logika pasar, bukan manusia yang merdeka berpikir dan berintegritas.¹⁶

Dengan demikian, pendidikan di era komersialisasi menghadapi dilema mendasar: antara idealisme pembebasan manusia dan realitas ekonomi yang mengekang. Pendidikan memang tetap berperan sebagai instrumen mobilitas sosial, tetapi mobilitas ini kini sangat bergantung pada daya beli. Tantangan terbesar adalah bagaimana mengembalikan makna pendidikan ke hakikatnya sebagai proses pembentukan manusia seutuhnya, bukan sekadar investasi ekonomi.¹⁷ Diperlukan kebijakan yang menegaskan kembali fungsi sosial pendidikan: agar ia tidak hanya mencetak individu sukses secara material, tetapi juga membangun masyarakat yang kritis, adil, dan bermartabat. Sebab pendidikan sejati bukanlah tentang siapa yang mampu membayar paling mahal, melainkan siapa yang mampu menjadi manusia terbaik bagi sesamanya.

Marginalisasi Kapital Budaya

Marginalisasi kapital budaya dalam pendidikan mengacu pada menurunnya perhatian terhadap aspek literasi kritis, seni, dan budaya lokal dalam sistem pendidikan modern. Proses ini merupakan konsekuensi dari dominasi paradigma ekonomi dan pragmatisme yang menjadikan pendidikan sekadar sarana untuk memperoleh pekerjaan dan keuntungan material.¹⁸ Akibatnya, pendidikan kehilangan dimensi humanistiknya, yaitu fungsi untuk menumbuhkan kesadaran, kepekaan, dan kebijaksanaan manusia sebagai makhluk sosial dan kultural. Kapital budaya yang mencakup pengetahuan, keterampilan estetis, nilai-nilai tradisi, serta kepekaan terhadap identitas lokal tidak lagi dianggap relevan sebagai modal sosial menuju kesuksesan. Pendidikan, yang seharusnya menjadi ruang pembentukan manusia berbudaya, kini beralih menjadi pabrik pencetak tenaga kerja.

Penurunan Perhatian Terhadap Literasi Kritis Dan Budaya Lokal

Dominasi paradigma kapitalistik dan pragmatis dalam pendidikan membuat dimensi literasi kritis, seni, dan budaya lokal kehilangan tempat dalam kurikulum. Orientasi pendidikan kini lebih menekankan pada

¹⁶ "Dagang Ilmu: Komersialisasi Lembaga Pendidikan di Era Modern," *Kalimahsawa.id*, diakses [11 Oktober 2025], <https://kalimahsawa.id/dagang-ilmu-komersialisasi-lembaga-pendidikan-di-era-modern/>.

¹⁷ Novi Yulianti, Ahmad Husnul Wahab, & Ahmad Alfian Darmawan. (2024). Dampak Komersialisasi Pendidikan terhadap Kesenjangan Sosial. *Kariman: Jurnal Pendidikan Keislaman*, 12(1), 61–74. <https://doi.org/10.52185/kariman.v12i1.422>

¹⁸ Nurqadriani dan Dahzain Nur, "Kapitalisme Pendidikan: Melawan Kapitalisasi dalam Dunia Pendidikan," *Dahzain Nur* 12, no. 1 (2022).

penguasaan keterampilan teknis yang dianggap segera berguna bagi dunia industri. Sementara itu, kemampuan reflektif dan apresiasi terhadap kebudayaan dianggap “tidak produktif” secara ekonomi. Akibatnya, generasi muda kehilangan akar budaya, melemah dalam memahami sejarah dan identitasnya sendiri, serta menjadi rentan terhadap westernisasi atau bahkan homogenisasi budaya global.¹⁹ Pendidikan yang sejatinya bertugas membebaskan manusia dari kebodohan dan keterasingan sosial, berubah menjadi instrumen penyesuaian terhadap tuntutan pasar kerja.

Ketiadaan literasi kritis juga berdampak pada berkurangnya kemampuan peserta didik untuk mengkritisi realitas sosial, ideologi, dan ketimpangan struktural yang melingkupi hidup mereka. Dalam konteks ini, pendidikan justru berpotensi menanamkan kepatuhan pada sistem yang ada, alih-alih membentuk kesadaran kritis yang membebaskan. Seperti yang dijelaskan oleh Paulo Freire, pendidikan tanpa kesadaran kritis hanyalah “banking education,” di mana siswa menjadi wadah pasif untuk diisi pengetahuan teknis tanpa diberi ruang untuk berpikir reflektif dan dialogis.²⁰

Hilangnya Fungsi Humanistik

Fungsi pendidikan sebagai pembentuk manusia seutuhnya yang mampu berpikir kritis, berempati, dan berbudaya semakin terpinggirkan oleh logika efisiensi dan orientasi pasar. Lembaga pendidikan berubah menjadi institusi ekonomi yang diukur dari output, ranking, dan profitabilitas, bukan dari kemampuan membangun karakter dan moralitas. Proses pendidikan yang seharusnya menumbuhkan kebijaksanaan dan kepekaan sosial kini direduksi menjadi sistem pelatihan yang menekankan produktivitas dan sertifikasi.

Dalam situasi ini, pendidikan kehilangan roh humanistiknya. Manusia dididik bukan lagi untuk menjadi “makhluk berpikir,” melainkan “makhluk yang siap bekerja.” Pergeseran orientasi ini mengakibatkan penyusutan ruang bagi nilai-nilai kemanusiaan, estetika, dan spiritualitas. Padahal, dimensi-dimensi inilah yang sesungguhnya membedakan manusia dari mesin. Ketika pendidikan hanya diukur dari output ekonomi, maka manusia yang dihasilkan adalah manusia fungsional, bukan manusia yang utuh dan berkepribadian.

¹⁹ Fernanda Bagus Wijnarko, “Kesulitan Kebudayaan Lokal dalam Pendidikan Nasional di Era Modern,” *Kompasiana*, 21 Agustus 2024, <https://www.kompasiana.com/fernandabagus9891/66c5f964c925c471af748cc5/kesulitan-kebudayaan-lokal-sebagai-bahan-pembelajaran-dalam-pendidikan-nasional-di-era-modern>

²⁰ Muhammad Jaya Negara, “Paulo Freire Menolak Konsep ‘Banking Education,’” *IBTimes Indonesia*, diakses 19 Oktober 2025, <https://ibtimes.id/paulo-freire-menolak-konsep-banking-education>, <https://www.kompasiana.com/fernandabagus9891/66c5f964c925c471af748cc5/kesulitan-kebudayaan-lokal-sebagai-bahan-pembelajaran-dalam-pendidikan-nasional-di-era-modern>

Akibatnya, tujuan luhur pendidikan sebagai upaya pembebasan manusia dari kebodohan, ketidakadilan, dan keterasingan semakin kabur. Pendidikan tidak lagi menjadi ruang dialog dan refleksi, melainkan arena kompetisi tanpa makna. Guru kehilangan perannya sebagai pendidik yang menumbuhkan jiwa, dan berubah menjadi pelatih yang mengejar target kurikulum. Sementara itu, siswa didorong untuk menghafal, bukan memahami; untuk bersaing, bukan bekerja sama. Jika arah ini terus dibiarkan, maka pendidikan hanya akan melahirkan generasi yang cerdas secara teknis, tetapi miskin rasa kemanusiaan. Diperlukan reorientasi pendidikan menuju paradigma yang lebih humanistik, kritis, dan berkeadaban.

Kapital Budaya dan Kesuksesan Sosial

Kapital budaya menurut Pierre Bourdieu mencakup kemampuan simbolik seperti cara berbicara, berpikir, berapresiasi terhadap seni, serta pengetahuan tentang budaya dan sejarah.²¹ Dahulu, kapital budaya berfungsi penting dalam menentukan posisi sosial seseorang karena ia mencerminkan tingkat peradaban dan kepekaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Namun, dalam sistem pendidikan yang pragmatis dan terkomodifikasi, kapital budaya kehilangan relevansinya. Kesuksesan sosial kini lebih ditentukan oleh kapital ekonomi dan keterampilan teknis yang dapat diuangkan secara langsung.

Fenomena ini menandakan penyempitan definisi “keberhasilan.” Seseorang dianggap berhasil bukan karena kebijaksanaan, kontribusi sosial, atau pemahaman budayanya, tetapi karena jabatan, pendapatan, atau kompetensi teknis. Akibatnya, pendidikan yang semestinya menjadi medan pembentukan modal budaya justru berperan dalam menyingkirkan nilai-nilai tersebut. Jika dibiarkan, masyarakat akan semakin miskin secara budaya meskipun kaya secara material.

Marginalisasi kapital budaya dalam pendidikan menimbulkan krisis identitas dan dehumanisasi dalam sistem pembelajaran. Pendidikan kehilangan daya transformasinya karena terjebak dalam logika pasar dan efisiensi ekonomi. Untuk mengembalikan fungsi sejatinya, pendidikan perlu diarahkan kembali ke orientasi humanistik yang menempatkan literasi kritis, seni, dan budaya lokal sebagai inti pembelajaran. Hal ini bukan sekadar soal mempertahankan warisan budaya, tetapi tentang membangun manusia yang sadar, reflektif, dan berakar pada nilai-nilai kemanusiaan universal. Membangun pendidikan yang berpihak pada pengembangan kapital budaya berarti mengembalikan pendidikan pada misinya yang paling mendasar:

²¹ Saul McLeod, “Cultural Capital: The Theory of Pierre Bourdieu,” *Simply Psychology*, diakses 19 Oktober 2025, <https://www.simplypsychology.org/cultural-capital-theory-of-pierre-bourdieu.html>.

mencerdaskan kehidupan bangsa, membebaskan manusia dari keterasingan, dan membentuk masyarakat yang beradab serta berkeadilan.

Reposisi Kapital Budaya untuk Pendidikan Kritis

Reposisi kapital budaya dalam pendidikan kritis menuntut perubahan mendasar terhadap cara pandang kita terhadap fungsi pendidikan. Pendidikan tidak boleh lagi direduksi menjadi sekadar alat produksi tenaga kerja, melainkan harus menjadi ruang pembentukan manusia yang kritis, reflektif, dan berakar pada nilai-nilai budaya. Upaya ini menitikberatkan pada reorientasi kurikulum menuju penguatan literasi kritis dan apresiasi budaya lokal, sekaligus mengintegrasikan nilai moral, estetika, dan refleksi sosial dalam seluruh proses pembelajaran.²² Pendidikan yang sejati adalah pendidikan yang memanusiakan manusia, bukan sekadar mempersiapkan mereka untuk bekerja.

Reorientasi pendidikan menjadi kunci utama dalam membangun sistem pembelajaran yang kritis dan berkeadilan. Kurikulum harus dirancang tidak hanya untuk mentransfer pengetahuan teknis, tetapi juga untuk menumbuhkan kemampuan berpikir kritis dan kesadaran sosial peserta didik.²³ Literasi kritis memungkinkan peserta didik membaca dunia, bukan hanya membaca teks. Dengan cara ini, mereka tidak sekadar menjadi penerima informasi, melainkan subjek yang mampu memahami dan menilai realitas sosial, politik, dan budaya di sekitarnya. Apresiasi terhadap budaya lokal juga harus menjadi bagian integral dari pendidikan agar identitas dan nilai-nilai luhur bangsa tidak terkikis oleh arus globalisasi dan kapitalisme pendidikan yang seragam dan homogen.

Selain itu, pendidikan harus mengintegrasikan nilai moral dan estetika sebagai bagian esensial dari pembentukan manusia seutuhnya.²⁴ Kecerdasan intelektual tanpa kepekaan moral hanya akan menghasilkan manusia yang cerdas tetapi kehilangan arah etis. Nilai-nilai moral dan estetika harus hadir bukan sebagai pelengkap kurikulum, melainkan sebagai fondasi pendidikan humanistik yang membentuk integritas pribadi dan kesadaran sosial. Pendidikan yang berakar pada keindahan, empati, dan kebijaksanaan mampu

²² Innayah Wulandari, Eko Handoyo, Arief Yulianto, Sri Sumartiningsih, dan Philip X. Fuchs, "Integrasi Nilai Kearifan Lokal dalam Pendidikan Karakter Siswa di Era Globalisasi," *Pendekar: Jurnal Pendidikan Berkarakter* 7, no. 4 (Desember 2024): 370–376, <http://journal.ummat.ac.id/index.php/pendeka>

²³ Irma Aryani dan Muhamad Sofian Hadi, "Implementasi Gerakan Literasi di Sekolah Dasar: Implikasinya pada Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Sekolah Dasar," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Citra Bakti* 12, no. 2 (2025): 329, <https://doi.org/10.38048/jipcb.v12i2.5116>.

²⁴ Asbullah Muslim, "Integrasi Estetika dalam Pembelajaran di Sekolah Dasar," *Modeling: Jurnal Program Studi PGMI* 4, no. 1 (Maret 2017).

menumbuhkan generasi yang tidak hanya rasional, tetapi juga berperasaan, beretika, dan memiliki kepekaan terhadap penderitaan sosial.²⁵

Pemberdayaan peserta didik menjadi prinsip utama dalam pendidikan kritis. Peserta didik tidak boleh diposisikan sebagai objek yang pasif menerima pengetahuan dari otoritas guru, tetapi harus menjadi subjek yang aktif membangun pengetahuannya sendiri melalui dialog dan refleksi. Pendidikan harus menjadi ruang partisipatif di mana peserta didik dapat mengemukakan gagasan, mempertanyakan asumsi, dan menafsirkan dunia dari perspektifnya sendiri. Hanya dengan cara ini pendidikan dapat melahirkan manusia yang merdeka berpikir dan memiliki daya kritis terhadap struktur sosial yang menindas.

Dalam kerangka ini, pendidikan juga perlu dipahami sebagai ruang dialog antarberbagai bentuk kapital ekonomi, budaya, sosial, dan simbolik. Semua bentuk kapital harus dihargai secara setara agar pendidikan tidak lagi menjadi arena dominasi kapital ekonomi semata. Integrasi dan konversi antarkapital secara inklusif memungkinkan terwujudnya sistem pendidikan yang adil dan demokratis, di mana keberhasilan seseorang tidak hanya diukur dari kekayaan material, tetapi juga dari keluasan wawasan, kehalusan budaya, dan kontribusi sosialnya. Pendidikan yang demikian akan berfungsi sebagai kekuatan transformatif yang mampu mengurangi kesenjangan sosial serta memperkuat kohesi budaya dan kemanusiaan.

Dengan demikian, reposisi kapital budaya dalam pendidikan kritis bukan sekadar perubahan teknis, melainkan pembaruan paradigma yang menyentuh inti dari makna pendidikan itu sendiri. Pendidikan harus menjadi ruang dialog multi-kapital yang holistik—sebuah tempat di mana ilmu, nilai, dan budaya bertemu dalam upaya membentuk manusia yang kritis, reflektif, dan humanis. Tujuan akhirnya bukan hanya menghasilkan tenaga kerja yang kompeten, tetapi manusia yang berdaya, berakar pada kebudayaan, serta berkomitmen pada keadilan sosial dan kemajuan peradaban.

Kesimpulan

Pada dasarnya pendidikan merupakan tempat membentuk manusia yang kritis bermoral dan beradab. Namun berdasarkan fakta dilapangan, pendidikan kerap kali dikuasai oleh mereka yang memiliki kapital ekonomi dan sosial sehingga mengakibatkan tersingkirnya kapital budaya sebagai unsur esensial dalam proses pembelajaran. Dominasi dua kapital tersebut menjadikan

²⁵ Ummi Soleha, Rina Diniati, dan Ika Kurnia Sofiani, "Membangun Pendidikan Berbasis Etika: Perspektif Al-Ghazali," *HEMAT: Journal of Humanities Education Management Accounting and Transportation* 1, no. 2 (Agustus 2024).

pendidikan lebih berorientasi pada mobilitas ekonomi, status sosial, dan kompetisi pasar, bukan pada pengembangan kesadaran kritis dan nilai-nilai kemanusiaan.

Kapital budaya, sebagaimana dipahami oleh Pierre Bourdieu, memiliki peran fundamental dalam membentuk kemampuan berpikir reflektif, apresiasi terhadap seni dan budaya, serta kepekaan moral terhadap realitas sosial. Ketika dimensi ini terpinggirkan, pendidikan kehilangan fungsi humanistiknya dan berubah menjadi alat reproduksi ketimpangan sosial.

Reposisi kapital budaya menjadi kebutuhan mendesak agar pendidikan kembali pada tujuannya sebagai sarana emansipasi dan pemberdayaan manusia. Upaya ini menuntut reorientasi kurikulum yang menekankan literasi kritis, penghargaan terhadap budaya lokal, dan integrasi nilai moral serta estetika dalam seluruh proses pembelajaran. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya menghasilkan individu yang cerdas secara intelektual, tetapi juga berkarakter, berbudaya, dan memiliki tanggung jawab sosial.

Pendidikan yang berakar pada kapital budaya akan mampu menciptakan masyarakat yang lebih adil, kritis, dan beradab. Hanya dengan mengembalikan peran kapital budaya, pendidikan dapat kembali menjalankan panggilannya sebagai kekuatan transformatif yang memanusiakan manusia dan memperjuangkan keadilan sosial.

Daftar Pustaka

- Ali, Mahnoor. "The Right to Education Act in India: Success and Challenges in Implementation." *Broken Chalk*, 2025. <https://brokenchalk.org/the-right-to-education-act-in-india-success-and-challenges-in-implementation/>.
- Aryani, Irma, and Muhamad Sofian Hadi. "Implementasi Gerakan Literasi di Sekolah Dasar: Implikasinya pada Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Sekolah Dasar." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Citra Bakti* 12, no. 2 (2025): 329. <https://doi.org/10.38048/jipcb.v12i2.5116>.
- "Dagang Ilmu: Komersialisasi Lembaga Pendidikan di Era Modern." *Kalimahsawa.id*. Accessed October 11, 2025. <https://kalimahsawa.id/dagang-ilmu-komersialisasi-lembaga-pendidikan-di-era-modern/>.
- Darma, Surya, and Annisa Fithria. "Harga Mahal Komersialisasi Pendidikan." *Majalah Suara 'Aisyiyah*, June 7, 2024. <https://suaraaisyiyah.id/harga-mahal-komersialisasi-pendidikan/>.
- Dwijonagoro, KRT Samsul Hadi. *Permasalahan Pendidikan dan Solusinya di Indonesia*. n.d.
- Jamaludin, Ujang, Reksa Adya Pribadi, and Siti Sarni. "Implementasi Model Problem Based Learning pada Pembelajaran IPA untuk Mengembangkan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa." 2023.
- Juliananda, Aulia. "Dampak Komersialisasi Pendidikan terhadap Pembangunan Karakter Bangsa: Apa Solusinya?" *Kompasiana*, June 12, 2024. <https://www.kompasiana.com/juliaulia/6669c67534777c2d1701ce42/dampak-komersialisasi-pendidikan-terhadap-pembangunan-karakter-bangsa-apa-solusinya>.

- Lutfillah, Maya Muizatil, Arita Marini, and Maratun Nafiah. "Pengelolaan Pendidikan Dasar Dikaitkan dengan Mobilitas Sosial." *An-Nidzam: Jurnal Manajemen Pendidikan dan Studi Islam* 9, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.33507/an-nidzam.v9i1.465>.
- McLeod, Saul. "Cultural Capital: The Theory of Pierre Bourdieu." *Simply Psychology*. Accessed October 19, 2025. <https://www.simplypsychology.org/cultural-capital-theory-of-pierre-bourdieu.html>.
- Miftahusyain, M. *Kapital Sosial dan Pembangunan di Indonesia*. n.d.
- Miranda, and Fransiska Rambu Aya Mayi. "Pendidikan Sebagai Sarana Mobilitas Sosial dalam Masyarakat Multikultural." *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 7, no. 4 (2025): 88–94. <https://doi.org/10.6578/triwikrama.v7i4.11074>.
- Muammar, Rinaldi. "Pendidikan sebagai Pilar Kesejahteraan: Menghubungkan Pendidikan dengan Kemajuan Sosial dan Ekonomi." *Jurnal Ekodik* 8, no. 1 (2020): 1–6.
- Muhsin, Moh Ali. "Komersialisasi Pendidikan Perlebar Kesenjangan Sosial." *Mambaul Ulum Bata-Bata*, August 26, 2022. <https://bata-bata.net/2022/08/26/Komersialisasi-Pendidikan-Perlebar-Kesenjangan-Sosial.html>.
- Muslim, Asbullah. "Integrasi Estetika dalam Pembelajaran di Sekolah Dasar." *Modeling: Jurnal Program Studi PGMI* 4, no. 1 (March 2017).
- Mustikasari, Mega, Arlin Arlin, and Syamsu A. Kamaruddin. "Pemikiran Pierre Bourdieu dalam Memahami Realitas Sosial." *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora* 6, no. 1 (2023): 12. <https://doi.org/10.31539/kaganga.v6i1.5089>.
- Nazmi, Maya Mutia, and Yusnita Lisda Pulungan. "Peran Pendidikan sebagai Alat Transformasi Sosial." *Jurnal Kajian Agama Islam* 8, no. 12 (2024). <https://share.google/rychmPPxYo9OzoWC1>.
- Negara, Muhammad Jaya. "Paulo Freire Menolak Konsep 'Banking Education'." *IBTimes Indonesia*. Accessed October 19, 2025. <https://ibtimes.id/paulo-freire-menolak-konsep-banking-education/>.
- Nurqadriani, and Dahzain Nur. *Kapitalisme Pendidikan: Melawan Kapitalisasi dalam Dunia Pendidikan*. 2022.
- Permadi, Aji. "Kualitas Pendidikan Kita Bersahabat Karib dengan Kebobrokan." Jakarta, 2024. <https://www.kompas.id/artikel/kualitas-pendidikan-kita-bersahabat-karib-dengan-kebobrokan>.
- RudiRahman, Amri. "Pendidikan dan Status Sosial." *Kompasiana*, February 3, 2022. <https://www.kompasiana.com/amrirudi354/61fbefa7b4616e129807bbb3/pendidikan-dan-status-sosial>.
- Santo. "Pengaruh Pendidikan terhadap Mobilitas Sosial." *Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Medan Area*, August 16, 2024. <https://pemerintahan.uma.ac.id/2024/08/pengaruh-pendidikan-terhadap-mobilitas-sosial/>.
- Soleha, Ummi, Rina Diniati, and Ika Kurnia Sofiani. "Membangun Pendidikan Berbasis Etika: Perspektif Al-Ghazali." *HEMAT: Journal of Humanities Education Management Accounting and Transportation* 1, no. 2 (August 2024).
- Wijanarko, Fernanda Bagus. "Kesulitan Kebudayaan Lokal dalam Pendidikan Nasional di Era Modern." *Kompasiana*, August 21, 2024. <https://www.kompasiana.com/fernandabagus9891/66c5f964c925c471af748cc5/kesulitan-kebudayaan-lokal-sebagai-bahan-pembelajaran-dalam-pendidikan-nasional-di-era-modern>.

- Wulandari, Innayah, Eko Handoyo, Arief Yulianto, Sri Sumartiningsih, and Philip X. Fuchs. "Integrasi Nilai Kearifan Lokal dalam Pendidikan Karakter Siswa di Era Globalisasi." *Pendekar: Jurnal Pendidikan Berkarakter* 7, no. 4 (2024): 370–376. <http://journal.ummat.ac.id/index.php/pendeka>.
- Yuliati, Novi, Ahmad Husnul Wahab, and Ahmad Alfian Darmawan. "Dampak Komersialisasi Pendidikan terhadap Kesenjangan Sosial." *Kariman: Jurnal Pendidikan Keislaman* 12, no. 1 (2024): 61–74. <https://doi.org/10.52185/kariman.v12i1.422>.